

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji permasalahan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan peraturan perundang undangan Yayasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini menemukan bahwa masih adanya Anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan yang belum disesuaikan dengan adanya Undang Undang Yayasan. Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 dimana terdapat 2 (dua) opsi, yaitu bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dengan berdasarkan Pasal 37 A dan Yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum dengan berdasarkan Pasal 15 A

Akibat hukum akta yang dibuat oleh Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan perundang-undangan mengenai Yayasan akan berpengaruh terhadap Akta yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dapat dibatalkan dimaksudkan bahwa subyek penghadapnya tidak terpenuhi legal standingnya atau/tidak kurang lengkap misalnya tidak semua mantan pengurus hadir dalam rapat pengurus yayasan lengkap menjelang penyesuaian, sedangkan batal demi hukum bahwa dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris, penyesuaiannya tidak mendasarkan atau melanggar Pasal 37 A atau Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi perdata dan klien dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan proses penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan oleh yayasan berdasarkan pada Rapat yang dihadiri oleh semua pihak yang terkait dengan organ yayasan (pendiri, Pembina, pengurus) dan tetap berpedoman pula pada pasal 1320 KUHPdt

Penelitian ini merekomendasikan agar Notaris dalam membuat Akta harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Yayasan dimana dalam hal penyesuaian yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang yang harus mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan.

Kata Kunci : Penyesuaian anggaran dasar yayasan sebelum undang undang yayasan dan akibat hukum.

ABSTRACT

This thesis examines issues regarding adjustments to the Foundation's Articles of Association which were established before the Foundation Law to be adjusted to the Foundation Law and its legal consequences if the Notary Public does not make adjustments to the Foundation's Articles of Association based on the laws and regulations of the Foundation.

The method used in this research is the statutory approach (state approach) and the conceptual approach with the research analysis used is qualitative descriptive. The result of this thesis study found that there were still Foundation Articles of Association which were established before the Foundation Law which had not been adjusted to the Law of foundation. Foundations established before the birth of the Foundation Law must refer to Government Regulation Number 2 of 2013 in which there are 2 (two) options, namely for foundations that are still recognized as legal entities based on Article 37 A dan foundations that are no longer recognized as legal entities with based on Article 15 A.

The legal consequences of the deed made by the Notary Public do not make adjustments to the Articles of Association of the Foundation in accordance with the regulations regarding the Foundation will affect the Deed that is made can be canceled or null and void by law. Can be canceled, it is intended that the subject to the legal standing is not fulfilled or / is not complete, for example, not all former managers are present at the meeting of the foundation's management complete before the adjustment, whereas it is null and void that in the case of a notarial deed, the adjustment is not based on or violates Article 37 A or Article 15 A. Government Regulation Number 2 of 2013. Notaries may be subject to administrative sanctions or civil sanctions and clients may be subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. In carrying out the process of adjusting the articles of association carried out by the foundation based on a Meeting attended by all parties related to the foundation's organs (founders, coaches, management) and also guided by article 1320 of the Indonesia Criminal Code.

This research recommends that the Notary in making Deed must be based on Foundation legislation which in case of on adjusting the foundation established before the law which must base on Government Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendmest to Government Regulation Number 63 of 2008 concerning the implementastion of the Foundation Law.

Keyword : Adjustment of the foundation's charter before the foundation law and legal consequences